

## **ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA IMPLEMENTASI PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Yupiter M. Ludji Pau<sup>1</sup>, Thobias E.D. Tomasowa<sup>2</sup> dan Jenny S. Sir<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang  
<sup>\*</sup>E-mail: YupiterPau@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran BPPKAD Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017. Penilaian konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) sedangkan untuk analisis konsistensi anggaran PPAS dan APBD dilakukan dengan menggunakan deviasi anggaran dan untuk mengetahui penyebab ketidakkonsistensi dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan yang tidak konsisten, namun secara umum antar dokumen telah menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Sedangkan untuk programnya telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Untuk tingkat konsistensi anggaran antara PPAS dan APBD BPPKAD Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan tingkat konsistensi yang kurang baik.

**Kata kunci:** *Perencanaan, Penganggaran, Renstra, Renja, RKPD, PPAS & APBD*

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintahan harus menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas berbagai pilihan.

Keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Khusaini, 2009).

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu SKPD yang menyusun Perencanaan dan penganggarnya dengan visi yaitu terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan, akuntabel, represif dan berorientasi pada kepentingan publik guna peningkatan pelayanan prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional. Masalah yang ditemukan dalam pencapaian visi tersebut terkait perencanaan dan penganggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu ketidakconsistenan kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang dan tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017 dalam RKPD Tahun 2017, namun ada yang tidak termuat dalam PPAS Tahun 2017 dalam APBD Tahun 2017. Peneliti ingin menguji kembali penelitian dengan judul senada karena hasilnya masih menunjukkan perbedaan (Burin, 2015; Osrinda & Delis, 2016; Darlina et al, 2016; Triyono et al, 2019).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi bagaimana tingkat konsistensi program/kegiatan antara dokumen

perencanaan dan dokumen penganggaran serta implementasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi program/kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta implementasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian yang dilakukan Wisnu (2008) menyatakan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program Wajib Belajar 9 Tahun sekitar 16, 7% kegiatan yang sangat konsisten sedangkan sekitar 83,3% tidak konsisten. Penelitian Rini (2008) menunjukkan bahwa penyusunan RPJPD dan RPJMD di Solok Selatan kurang menunjukkan konsistensi, secara kuantitatif hanya sekitar 50% program kegiatan di RPJMD yang sinkron dengan program kegiatan di RPJP. Adapun penelitian Rutiana (2007) menyatakan bahwa konsistensi terendah muatan dokumen menurut regulasi adalah RKPD. Dari segi konsistensi kesesuaian program dan kegiatan konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS ke APBD. Konsistensi terendah pada dokumen RKPD dengan APBD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis, untuk penelitian ini yaitu jika dokumen perencanaan & penganggaran disusun dengan tepat, maka konsistensi antara perencanaan dan realisasinya akan dapat dicapai.

### METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Silalahi, 2010). Sumber data menggunakan yaitu: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi ataupun wawancara dengan pegawai yang terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2016-2017, pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) Data sekunder adalah dokumen berupa Renstra 2012-2017, Renja tahun 2016-2017, RKPD tahun 2016-

2017, PPAS tahun 2016-2017, dan APBD tahun 2016-2017.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konsistensi dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Menurut Silalahi (2010), Konsistensi program dan kegiatan dapat disederhanakan seperti tertera pada tabel 1:

Tabel 1 Pengelompokan Konsistensi Program/Kegiatan

No	Program dan kegiatan Dokumen		Penilaian Konsistensi
	A	B	
1	Ada	Ada	Konsisten
2	Ada	Tidak	Tidak
3	Tidak ada	Ada	Konsisten
		Tidak	Tidak Konsisen

Menurut Silalahi (2010) untuk menentukan tingkat konsistensi yaitu:

$$\text{Tingkat Konsistensi} = \frac{\text{Jumlah Program/kegiatan yang Konsisten}}{\text{Total Program/kegiatan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui jumlah deviasi anggaran, yaitu didapat dari anggaran APBD dikurangi dengan Anggaran PPAS. Sedangkan untuk mengetahui presentase deviasinya didapat dari jumlah deviasi dikurangi dengan anggaran PPAS dikali seratus persen. Jumlah dan presentase (%) deviasi anggaran untuk program dan kegiatan yang telah konsistensi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan di dalam Renja dan RKPD Tahun 2016 dan 2017, ada ketidakkonsistensi satu dengan lainnya, terbukti masih ada kegiatan di Renja yang belum diakomodir dalam RKPD begitu juga masih ada kegiatan di RKPD yang tidak berlandaskan pada Renja. Sedangkan untuk program, telah menunjukkan konsistensi yang sangat baik (100%) artinya program yang ada dalam Renja telah diakomodir ke dalam RKPD dan program yang ada dalam RKPD telah berpedoman pada Renja.

Tabel 2 Jumlah Kegiatan dan Persentase Tingkat Konsistensi Renja dan RKPD.

Status Kegiatan	Renja 2016		RKPD 2016	
	Keg	%	Keg	%
1.Konsisten	19	82,61	19	79,17

## 2. Tidak Konsisten:

a. Ada di Renja, tidak ada di RKPD

4 17,39 -

b. Tidak ada di Renja, ada di RKPD

- 5 20,83

Jumlah

23 100 24 100

Status Kegiatan	Renja 2017		RKPD 2017	
	Keg	%	Keg	%
1. Konsisten	21	91,31	21	95,46
2. Tidak Konsisten:				
a. Ada di Renja, tidak ada di RKPD	2	8,69	-	
b. Tidak ada di Renja, ada di RKPD	-		1	4,54
Jumlah	23	100	22	100

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada 23 kegiatan di Renja dan 24 kegiatan di RKPD, dan terdapat 19 kegiatan yang konsisten. Artinya ada 79,17% kegiatan yang ada dalam RKPD tersebut yang berpedoman pada Renja dan 82,61% kegiatan Renja yang diakomodir dalam RKPD. Sedangkan pada tahun 2017 ada 23 kegiatan di Renja dan 22 kegiatan di RKPD, dan terdapat 21 kegiatan yang konsisten. Artinya ada 95,46% kegiatan yang ada dalam RKPD tersebut berpedoman pada Renja dan 91,31% kegiatan Renja yang diakomodir dalam RKPD.

Hasil wawancara menemukan bahwa penyebab ketidakkonsistensi tersebut, antara lain karena ada perbedaan penyusun Renja disusun oleh SKPD, sedangkan RKPD disusun oleh BAPPEDA. Dalam RKPD ada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan melibatkan masyarakat sehingga ada beberapa usulan kegiatan yang sangat mendesak dan harus dimasukkan dalam RKPD.

Hasil Tingkat Konsistensi RKPD dan PPAS adalah pada tahun 2016, ada ketidakkonsistensi satu dengan lainnya, terbukti masih ada kegiatan di RKPD yang belum diakomodir dalam PPAS begitu juga masih ada kegiatan di PPAS yang tidak berlandaskan pada RKPD. Sedangkan pada tahun 2017, untuk kegiatan RKPD dan PPAS menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, dimana semua kegiatan pada RKPD telah diakomodir ke dalam PPAS dan semua kegiatan PPAS telah berpedoman pada RKPD. Untuk program tahun 2016 dan 2017 juga menunjukkan konsistensi yang sangat baik (100%) artinya program yang ada dalam RKPD telah diakomodir ke dalam PPAS dan program yang ada dalam PPAS telah berpedoman pada RKPD. Data pada tahun 2016 ada 23 kegiatan di PPAS dan 22 kegiatan di APBD, dan terdapat 20 kegiatan yang konsisten. Artinya ada 90,91 % kegiatan yang ada dalam APBD tersebut yang berpedoman pada PPAS dan 86,95% kegiatan PPAS yang diakomodir dalam APBD.

Pada tahun 2017 ada 22 kegiatan di PPAS dan 25 kegiatan di APBD, dan terdapat 22 kegiatan yang konsisten. Artinya ada 86,00% kegiatan yang ada dalam APBD tersebut berpedoman pada PPAS dan 100% kegiatan PPAS semuanya diakomodir dalam APBD.

Hasil wawancara menemukan penyebab ketidakkonsistensi tersebut, antara lain: keterlambatan penyampaian PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, sehingga mengurangi waktu dan kualitas untuk pembahasan RAPBD, Ketidaktelitian bagi perangkat daerah tentang program maupun kegiatan yang akan dianggarkan di APBD harus masuk dulu di PPAS dan tidak adanya pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran yang ketat sehingga program dan kegiatan dapat masuk pada dokumen APBD, namun sebelumnya tidak ada di PPAS.

Hasil tingkat konsistensi anggaran antara PPAS dan APBD BPPKAD Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017 tidak begitu baik, sebab pada tahun 2016 dari 20 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang anggarannya konsisten sedangkan pada tahun 2017 dari 21 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang anggarannya konsisten. Untuk mengetahui tingkat konsistensi anggaran, dapat dilihat pada tabel 3 yaitu:

Tabel 3 Tingkat Deviasi Anggaran Kegiatan dalam PPAS dan APBD

Tahun	Tingkat Deviasi			Keg	Jumlah Deviasi Anggaran
	< 10%	10% - 50%	>50%		
2016	3	8	5	16	(7.505.291.293)
2017	9	5	3	17	(3.349.605.400)

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa deviasi anggaran antara PPAS dan APBD untuk kegiatan pada BPPKAD Provinsi NTT tahun 2016 menunjukkan tingkat deviasi yang kurang baik karena tingkat deviasi < 10% hanya 3 kegiatan saja dan tingkat deviasi 10% - 50% ada 8 kegiatan, sedangkan tingkat deviasi >50% ada

5 kegiatan. Jumlah deviasi anggaran antara PPAS dan APBD Tahun 2016 adalah Rp. (7.505.291.293) jumlah ini menunjukkan minus (berkurang). Sedangkan deviasi anggaran antara PPAS dan APBD untuk kegiatan pada BPPKAD Provinsi NTT tahun 2017 menunjukkan tingkat deviasi yang baik karena tingkat deviasi < 10% ada 9 kegiatan dan tingkat deviasi 10% - 50% ada 5 kegiatan, sedangkan tingkat deviasi > 50% hanya ada 3 kegiatan saja. Jumlah deviasi anggaran antara Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 adalah Rp. (3.349.605.400) jumlah ini menunjukkan minus (berkurang).

Hasil wawancara menemukan bahwa penyebab ketidakkonsistensi anggaran ini, antara lain: adanya dana dari pemerintah pusat/APBN yang hadir pada rentang waktu setelah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati wajib diakomodir ke dalam penyusunan anggaran program/kegiatan Biro Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adanya penambahan atau pengurangan anggaran yang telah ditetapkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pengurangan anggaran ini dalam rangka efisiensi anggaran, adanya kesalahan membuat rincian dalam perhitungan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran BPPKAD Provinsi NTT berdasarkan analisis konsistensi antar dokumen (Renstra dan Renja, Renja dan RKPD, RKPD dan PPAS, PPAS dan APBD) dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk tahun 2016 dan 2017 masih terjadi ketidakkonsistensi kegiatan antara dokumen-dokumen tersebut. Secara umum hal yang menyebabkan ketidakkonsistensi antara dokumen tersebut (Renstra dan Renja, Renja dan RKPD, RKPD dan PPAS, PPAS dan APBD); 2. Hasil untuk tingkat konsistensi program setiap dokumen, telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik karena setiap program telah diakomodir dalam setiap dokumen; 3. Hasil untuk tingkat konsistensi anggaran antara PPAS dan APBD BPPKAD Provinsi NTT tahun 2016 dan 2017 kurang baik, sebab pada tahun

2016 dari 20 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang anggarannya konsisten sedangkan pada tahun 2017 dari 21 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang anggarannya konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk peningkatan BPPKAD Provinsi NTT disarankan sebagai berikut: 1. Diharapkan perlu memperhatikan konsistensi antara dokumen, sehingga visi/misi dapat tercapai dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan; 2. Diharapkan Perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran, misalnya melalui kursus atau pelatihan dibidang perencanaan dan penganggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burin, F. D. (2015). *Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.22219/jibe.v6i2.4178>
- Darlina, M., Yannizar, Y., & Hodijah, S. (2016). Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 257-268. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3527>
- Khusaini, Moh. (2009). *The Analysis of Consistency of Planning and Budgeting (Study of Some Districts and Cities in Indonesia)*. Malang: FEB UB.
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.2494>
- Oktavianti, Rini. (2008). Analisis Konsistensi Perencanaan dan penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di kabupaten Solok Selatan. *Tesis*, Universitas Andalas

- Osrinda, N., & Delis, A. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 151-162. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3517>
- Wahyuningshi, Rutiana D. (2007). *Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran (Studi Konsistensi Dokumen RKPD, PPAS dan APBD)*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Wisnu Graitto, Usodo. (2008). Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung. *Tesis*, Universitas Andalas.